

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI
TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV						
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Realisasi Investasi	591.885.000.000,00	591.885.000.000,00	591.885.000.000,00	591.885.000.000,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembinaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Didukung Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal	Pembinaan Kebijakan Daerah Mengingat Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/promosi dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen
							Pembuatan Pola Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Rekomendasi kegiatan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kegiatan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Dokumen
									Penyusunan Pola Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pola Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen
						Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Investasi Daerah yang Dipromosikan	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Didukung Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dididng Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen
									Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha	105 Kegiatan Usaha
									Penyelesaian Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75 Pelaku Usaha

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV						
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi					Program Pengendalian Pelaksanaan Model Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPM	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya	12 Kegiatan Usaha
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Dipelihara dan atau Dikembangkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemeliharaan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan yang Didah, Dikaji dan Dimantapkan	4 Dokumen
									Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan Usaha
									Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35 Orang/bulan
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV						
							Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Jumlah Serifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
								Penyediaan Barang Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	1 Paket
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
								Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit Gudang
									Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV						
							Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
							Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit


 Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi,
DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
 Pemangku Urusan Modal
 NIP. 19720130 198303 1 005